

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Grendeng sebagai berikut :

1. Aktor yang terlibat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Grendeng terdiri dari Pokja PKP Kabupaten Banyumas, Tim Koordinator Kota/Asisten Kota, Tim Fasilitator, BKM dan KSM. Dalam pelaksanaannya seluruh aktor telah berperan sesuai peran dan tupoksinya. Hanya saja masih ada beberapa anggota lembaga BKM dan KSM yang berperan pasif dalam pelaksanaan program kegiatan dikarenakan mempunyai kesibukan lain diluar program.
2. Berdasarkan kejelasan tujuan program, aktor yang berperan dalam implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Grendeng sudah mengetahui dan memahami tujuan program yaitu terwujudnya “Gerakan 100-0-100” yang bermakna 100% tercapainya akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak.
3. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin diantara lembaga yang ada pada Program KOTAKU di Kelurahan Grendeng dan hubungan diantara internal lembaga terjalin sudah cukup baik. Kegiatan rapat dengan tatap muka antara Tim Fasilitator, BKM, dan KSM setiap minggu selama program

dilaksanakan mempermudah penyampaian informasi dari pemerintah pusat dan mendukung keberlangsungan program. Untuk pedoman pelaksanaan Program KOTAKU hampir semua aktor lembaga yang terlibat sudah mengetahuinya namun sayangnya aktor lembaga tingkat kelurahan/desa yaitu KSM kurang mengetahui adanya pedoman pelaksanaan program.

4. Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Grendeng mendapatkan dukungan dari masyarakat penerima manfaat, hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program KOTAKU yang membantu dengan memberikan tenaga, materi berupa makanan kecil dan minuman bagi pekerja dalam kegiatan, dan mengizinkan lahannya digunakan sebagai sarana pelaksanaan program. Meskipun partisipasi masyarakatnya pada awal pelaksanaan program sulit karena masyarakat takut untuk bergabung menjadi anggota KSM.
5. Terdapat kendala selama kegiatan Program KOTAKU di Kelurahan Grendeng yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan yaitu adanya perijinan kembali lahan yang akan digunakan sebagai sarana pelaksanaan program karena perubahan kepemilikan lahan perseorangan. Masih adanya perspektif negatif dari beberapa Masyarakat mengenai aktor BKM dan KSM yang dianggap mendapatkan keuntungan dari kegiatan program.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis dari penelitian ini mempertega bahwa aspek "what's

happening" yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, model implementasi ini masih relevan sebagai indikator untuk mengukur implementasi sebuah kebijakan. Penemuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik.

Sementara itu, implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang harus diperhatikan agar implementasi Program KOTAKU dapat berkembang menjadi lebih baik, implikasi praktis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan dari Tim fasilitator atau lembaga yang ada di atas BKM dan KSM harus lebih ditekankan lagi sehingga anggota BKM dan KSM yang pasif dapat lebih berperan aktif kembali.
2. Pengetahuan tentang tujuan program harus selalu disosialisasikan dengan baik kepada aktor kegiatan program karena merupakan petunjuk dasar untuk mencapai keberhasilan program.
3. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemandirian implementor di tingkat desa, seperti BKM dan KSM, tim fasilitator dapat melakukan sosialisasi mengenai pedoman pelaksanaan program. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar BKM dan KSM dapat memahami dengan baik prosedur program serta peran dan tugas yang harus diemban, tanpa harus terus bergantung pada arahan dari tim fasilitator. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui sesi diskusi antara tim fasilitator dengan BKM dan KSM, di mana pedoman pelaksanaan program akan dijelaskan secara rinci dan

didiskusikan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Dengan demikian, diharapkan implementor di tingkat desa dapat lebih mandiri dan efektif dalam melaksanakan program.

4. Partisipasi Masyarakat harus selalu dijaga dan ditingkatkan, program bersifat swakelola maka masyarakat harus selalu dilibatkan dalam bentuk kegiatan.
5. Untuk mengubah perspektif masyarakat mengenai BKM dan KSM, BKM dapat memberikan sosialisasi dengan baik kemasyarakat misalnya saja dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat seperti dalam kegiatan kajian mingguan dengan meminta tokoh agama untuk sedikit-sedikit membahas dan memperkenalkan kegiatan program atau mensosialisaikan kegiatan program melalui mulut ke mulut secara jujur dan terbuka. Sehingga pengetahuan masyarakat menjadi lebih terbuka mengenai peran anggota BKM maupun KSM.

